

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu dokumen yang selalu hadir di dalam suatu lembaga adalah arsip. Arsip merupakan salah satu bagian penting yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Arsip juga berfungsi sebagai tempat menyimpan memori dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan memberikan informasi maupun evaluasi untuk kemajuan suatu lembaga. Untuk itu, pengelolaan arsip yang baik perlu dilakukan oleh setiap lembaga.

Berdasarkan audit internal yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, nilai akuntabilitas kearsipan daerah kota Cimahi masih sangat rendah, berkisar antara 33-40. Idealnya nilai tersebut harus mencapai minimal 60. Faktor utama rendahnya nilai akuntabilitas tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya kegiatan penyusutan arsip dan pengelolaan arsip.

Berdasarkan pantauan kerja yang pernah dilakukan oleh Bupati Bandung Barat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah Ngamprah, ditemukan masalah penumpukan arsip yang ada di kantor-kantor OPD. Jika arsip tersebut dibiarkan menumpuk, maka akan mempengaruhi kinerja pegawai. Dari pantauan tersebut, masih terdapat sarana dan prasarana yang belum optimal untuk, sehingga perlu untuk dibenahi.

Upaya dalam mengatasi masalah tersebut yakni dengan mengadakan pembinaan kearsipan kepada pegawai khususnya di lingkungan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar arsip. Lembaga kearsipan daerah perlu bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah selaku pencipta arsip sehingga dapat meningkatkan tertib arsip di lingkungan pemerintahan.

Pembinaan adalah tugas dan kewajiban dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Terdapat dua jenis pembinaan yang dilakukan oleh Dispusip Kota Bandung, yaitu pembinaan dalam bidang perpustakaan

dan bidang kearsipan. Pembinaan dalam bidang kearsipan tentu tidak kalah penting nya dengan pembinaan perpustakaan, karena peran arsip dalam organisasi kedudukannya sangat vital. Dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, arsip adalah suatu urusan yang wajib. Dengan adanya pembinaan dibidang kearsipan diharapkan akan meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola arsip. Dispusip sendiri sebagai lembaga teknis daerah dan pihak yang merumuskan kebijakan pemerintah provinsi mempunyai peranan penting dalam terselenggara nya kegiatan yang ada pada organisasi perangkat daerah. Salah satu peran Dispusip adalah dengan melakukan pembinaan kearsipan pada unit arsip yang berada dibawahnya.

Pembinaan kearsipan tentu bukan hal yang mudah, mengingat banyak nya lembaga pemerintahan dan dinas yang tersebar di Kota Bandung. Sebut saja, data menunjukkan bahwa jumlah unit kantor kecamatan yang ada di kota Bandung sebanyak 30 kecamatan, jumlah itu belum termasuk dengan dinas yang juga mendapatkan pembinaan dari Dispusip. Pada saat peneliti melakukan observasi ke Dispusip kota Bandung pada tanggal 09 November 2018, peneliti menemui beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembinaan kearsipan. Ketika peneliti menanyakan permasalahan dalam bidang kearsipan yang ada di unit arsip pada pemerintahan, informan menjelaskan bahwa mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) kekurangan sumber daya manusia dalam bidang kearsipan dan tidak ada nya arsiparis terampil yang memang berlatar belakang pendidikan arsiparis.

Beberapa opd yang sudah mendapatkan pembinaan kearsipan diantaranya adalah OPD Kecamatan, Kelurahan, dan Badan Usaha Milik Daerah. Namun, setelah dilakukan pembinaan, masih terdapat beberapa lembaga yang belum paham tentang tata cara pengelolaan arsip, sehingga tertib pengelolaan arsip belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut diketahui pada saat proses monev atau monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dispusip kota Bandung. Hal ini merupakan suatu realita yang harus dihadapi oleh Dispusip sehingga Dispusip tetap harus melakukan evaluasi dan pembinaan sampai diperoleh hasil yang

memuaskan. Pengelolaan arsip tentu saja tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah memaparkan berbagai kompetensi yang harus ada pada arsiparis. Menurut Permen PAN No. PER/3/M.PAN/3/2009 tentang “Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kredit nya pada pasal I disebutkan bahwa arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang”.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 09 November 2018, Dispusip Kota Bandung juga memiliki masalah dibidang pengelolaan kearsipan. Masalah yang dihadapi oleh Dispusip adalah kurangnya sumber daya manusia. Dispusip sendiri hanya memiliki tiga orang arsiparis yang memang berlatar belakang pendidikan arsiparis. Kemudian, depo arsip yang belum representatif. Depo arsip adalah gedung atau ruangan tempat menyimpan berkas arsip yang bernilai sejarah atau arsip vital. Masalah lain yang dihadapi oleh Dispusip yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dispusip sebagai lembaga teknis di tingkat provinsi memiliki wewenang dan kewajiban pada bidang kearsipan salah satunya dengan melakukan pembinaan kearsipan. Tentu saja harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong setiap instansi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi kearsipan dengan benar serta mengembangkan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kearsipan pada lembaga pemerintahan di wilayah kota Bandung. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah pada pembinaan kearsipan dikeluarkan oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang “Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 22 Tahun 2012 yang membahas tentang Desain Pembinaan Kearsipan di wilayah Pemerintahan Daerah”.

Secara keseluruhan kegiatan pembinaan kearsipan didasari oleh Undang-Undang No.43 Tahun 2009 yang membahas mengenai kearsipan

yang tercantum pada pasal 5, yakni membahas ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan diantaranya penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Untuk memperoleh hasil yang baik, arsip perlu dikelola dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya tersebut diantaranya organisasi, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sistem kearsipan, dan pembinaan anggaran/pembiayaan.

Aspek-aspek dalam melaksanakan pembinaan kearsipan tercantum dalam “Perka ANRI No.22 Tahun 2012 yang membahas mengenai Desain pembinaan kearsipan di lingkup pemerintahan daerah”. Dalam peraturan tersebut disebutkan aspek pembinaan pada BAB I yang meliputi pembinaan di bidang organisasi atau kelembagaan, pelatihan kepada sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan pada aspek sarana dan prasarana, aspek pelaksanaan pembinaan sistem dan yang terakhir adalah aspek anggaran. Kelima aspek tersebut menjadi acuan bagi pihak Dispusip untuk melakukan pembinaan kearsipan. Aspek pembinaan sistem akan menjadi fokus penelitian ini. Pembinaan sistem kearsipan sendiri akan membahas terkait tata cara penataan dan pengelolaan arsip, pengelolaan berkas arsip sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi, kepentingan akuntabilitas serta penyelamatan memori unit kerja.

Dari peraturan yang telah tercantum, maka sudah seyogyanya Dispusip Kota Bandung sebagai lembaga pemerintahan tingkat provinsi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan bina arsip pada tingkat pemerintahan daerah provinsi sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku dan kebutuhan di lapangan. selain itu, Dispusip sebagai pihak pembina perlu melakukan pembinaan dengan baik dengan melakukan strategi pembinaan dan kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adawiah (2017) yang berjudul “Pengelolaan Arsip Pada Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Polewali Mandar” menghasilkan kesimpulan bahwa “Dispusip Polewali Mandar perlu membuat sistem dalam hal penyimpanan

berkas supaya nantinya arsip tersebut bisa ditemukan secara akurat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, kondisi arsip yang memang belum berjalan dengan baik, Dispusip Polewali Mandar perlu memberikan diklat internal kepada para pegawai di bidang kearsipan tentang tata cara dalam mengelola arsip dinamis, menambah sarana-prasarana yang belum memadai, dan menyediakan orang yang khusus dalam mengelola arsip di lembaga nya. Dengan catatan, pegawai dapat mengelola arsip dengan sebaik-baiknya”.

Penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Dinullah (2018) dengan judul “Kegiatan Pembinaan Kearsipan Di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat Terhadap SKPD dan UKPD”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi pengelolaan arsip SKPD dan UKPD memiliki hambatan-hambatan, diantaranya “tidak adanya sarana-prasarana untuk menyimpan berkas arsip, kegiatan dalam pemeliharaan arsip yang belum cukup baik, tidak dilakukannya kegiatan dalam penilaian dan pemusnahan arsip, dan ruangan arsip yang masih tergabung dengan ruang tata usaha. Serta tidak adanya petugas yang kompeten dalam mengelola arsip di SKPD dan UKPD”. Dinas perpustakaan dan arsip kota administrasi Jakarta Barat perlu melakukan pembinaan arsip secara terus menerus kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola arsip di SKPD dan UKPD. Pembinaan oleh Sudin Pusip Kota Administrasi dilakukan dengan mengacu kepada “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang kearsipan daerah, yang meliputi penyusunan penyediaan pedoman kearsipan, pemberian bimbingan dan konsultasi, sosialisasi kearsipan, *supervise*/pengawasan kearsipan dan evaluasi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fahrudin (2017) yang berjudul “Manajemen Kearsipan Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan sistem kearsipan yang di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Proses kegiatan pengelolaan kearsipan tersebut menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

menggerakkan, dan pengendalian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, kegiatan manajemen kearsipan yang ada di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan manajemen kearsipan sesuai dengan asas-asas dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Organisasi pemerintahan ini juga kurang memberikan perhatian terhadap arsip itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya beberapa petugas yang belum paham bagaimana mengelola arsip yang benar. Untuk itu, para petugas yang mengelola arsip harus diberikan pemahaman dan juga pelatihan dalam mengelola arsip sehingga kegiatan manajemen kearsipan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini membahas mengenai upaya peningkatan tertib arsip pada unit arsip yang berada di kota Bandung. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Dispusip Kota Bandung. Pembinaan tersebut disesuaikan dengan aspek-aspek pembinaan yang tercantum dalam “Peraturan Kepala ANRI No.22 Tahun 2012 yang membahas mengenai Desain Pembinaan Kearsipan”. Aspek-aspek tersebut meliputi pembinaan dalam hal organisasi/kelembagaan, pelatihan di bidang sumber daya manusia, pembinaan dalam hal sarana dan prasarana, pelatihan dalam aspek sistem kearsipan, dan yang terakhir pembinaan dalam aspek anggaran/pembiayaan. Namun, peneliti akan berfokus pada aspek pembinaan sistem yang dilakukan oleh Dispusip kota Bandung, sehingga dapat diperoleh hasil kajian yang mendalam terkait dengan bagaimana tata cara pengelolaan arsip agar terwujudnya arsip yang utuh, autentik dan dapat diakses dengan mudah dan akurat. Perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terdapat pada tempat penelitian, dimana penelitian ini bertempat di Dispusip kota Bandung sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, kegiatan pembinaan kearsipan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perpustakaan umum untuk menciptakan masyarakat yang sadar arsip dan tertib pengelolaan arsip. Dalam kasus ini, instansi pemerintah yang merupakan bagian dari wilayah/kota perlu mendapatkan pembinaan kearsipan, karena semua lembaga pemerintahan seyogyanya memiliki dokumen-dokumen penting yang harus dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan. Peneliti memaparkan penelitian ini dengan memilih judul **“ANALISIS KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANDUNG”**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, permasalahan umum pada penelitian ini adalah “bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dispusip dalam melakukan pembinaan sistem kearsipan?”

Rumusan masalah khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1** Bagaimana peran Dispusip dalam membina penataan dan pengelolaan arsip?
- 1.2.2** Bagaimana peran Dispusip dalam membina pengelolaan berkas arsip agar dapat diakses dengan akurat untuk kepentingan berbagai pihak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, Tujuan penelitian ini yaitu untuk memaparkan kegiatan pembinaan sistem kearsipan sesuai dengan Perka ANRI No.22 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang:

- 1.3.1** peran Dispusip dalam membina penataan dan pengelolaan arsip
- 1.3.2** peran Dispusip dalam membina pengelolaan berkas arsip agar dapat diakses dengan akurat untuk kepentingan tertentu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis untuk berbagai pihak maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan sains informasi khususnya mengenai pembinaan sistem kearsipan oleh Dispusip Kota Bandung. Sehingga nantinya dapat berdampak baik bagi pihak perpustakaan umum maupun bagi kearsipan di lingkungan akademisi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis bagi:

#### 1) Dispusip kota Bandung

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dispusip Kota Bandung dalam memberikan informasi terkait dengan aspek-aspek dalam pembinaan kearsipan berdasarkan Peraturan yang berlaku. Sebagai perpustakaan umum, Dispusip memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan di bidang kearsipan pada instansi pemerintah di wilayah kota Bandung. Aspek-aspek pembinaan kearsipan sendiri telah tercantum pada Perka ANRI No.22 Tahun 2012. Sehingga dengan adanya acuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan kearsipan secara optimal.

#### 2) Arsiparis Dispusip kota Bandung

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi arsiparis sebagai pihak yang melaksanakan pembinaan kearsipan. Karena tidak semua permasalahan arsip pada organisasi perangkat daerah dapat secara



keseluruhan terlihat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari setiap permasalahan yang ada.

### 3) Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi kampus UPI Bumi Siliwangi. Karena unit kearsipan UPI Bumi Siliwangi juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan bacaan dan kajian bagi unit arsip yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia.

### 4) Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan.

## 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab dengan berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2018 yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Pada BAB ini membahas mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian serta struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Kajian Pustaka. Pada BAB ini, dijelaskan tentang landasan teori yang mendukung penelitian. Kajian pustaka diperoleh dari berbagai sumber baik sumber tercetak maupun non cetak seperti jurnal, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Kajian pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perpustakaan umum, fungsi perpustakaan umum, kearsipan dan pembinaan kearsipan.

BAB III Metode Penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana peneliti melakukan alur penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat, pengumpulan data, analisis data, dan triangulasi

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Bagian ini merupakan hasil dari analisis data yang diperoleh peneliti. Temuan dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan didukung oleh kajian pustaka yang sesuai dengan topik penelitian.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi. Bagian ini merupakan simpulan dan rekomendasi dari peneliti terkait dengan topik pembahasan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I pendahuluan.